

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Taufik dan hidayahNya semata sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah bagian dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 di susun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kami serta semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para pimpinan unit kerja lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan umumnya seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, sehingga

mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan.

Palu, Maret 2023
KEPALA PELAKSANA
BADANPENANGGULANGANBENCANA
DAERAH KOTA PALU

PRESLY TAMPUBOLON, SE
NIP.19670828 199303 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
1.3 Permasalahan Utama dan Issu Strategis	2
1.4 Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 CAPAIAN KINERJA BPBD KOTA PALU	8
3.2 REALISASI ANGGARAN	14
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Oleh karena itu dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Kota Palu telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya, Tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2009.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai bagian dari perangkat lainnya merupakan pelaksana dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi dan terkoordinir yang melibatkan semua satuan atau unit kerja untuk melaksanakan tugas prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Tujuan pembentukan organisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap penanggulangan bencana di Kota Palu, dimana secara geografis dan geologi Kota Palu sebagai daerah rawan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Palu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepala Walikota Palu. BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD dibantu oleh unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

1.2 **Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana meliputi: pencegahan bencana mencakup pencegahan bencana, penangana darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;

2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. melaporkan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan data penyaluran barang dan uang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.3 **Permasalahan Utama dan Issu Strategis**

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut terdapat pada tahapan: (1) prabencana yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) pada tahapan saat terjadi bencana yang menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistic serta peralatan; (3) pascabencana yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.

- A. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, permasalahan yang dihadapi diantaranya :
- (1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam Penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan Secara efektif dan komprehensif;
 - (3) penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah,. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya:
 - a. Masih terbatasnya kebijakan benanggulangan bencana di daerah;
 - b. Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
 - c. Belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- B. Tanggap Darurat, Permasalahan yang dihadapi diantaranya :
- (1) keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang bersumber dari pemerintah daerah Tanggap Darurat, Logistik Dan Peralatan, permasalahan yang di hadapi Diantaranya adalah:
 - a. Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam Penanggulangan bencana
 - b. Masih rendahnya ketersediaan logistic dan peralatan di daerah;
 - (2) masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
- C. Rehabilitasi dan Rekontruksi, permasalahan yang di hadapi diantaranya:
- (1) Kewenangan pengelolaan sungai di kota Palu bukan menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kota Palu tapi merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS III).

- (2) Belum adanya basis data yang termutakhirkan dan teradministrasi secara regular;
- (3) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- (4) Belum maksimalnya koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian;
- (5) Belum maksimalnya perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi;
- (6) keterbatasan lokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

1.4 **Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2021, disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, serta isu strategis yang di hadapi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu 2021.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan matriks target dan realisasi kinerja.

BAB IV. PENUTUP, menjelaskan secara ringkas kesimpulan dan saran perbaikan kinerja.

Lampiran-lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi : Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman Tangguh serta Profesional dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

Misi ke II : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana yakni Menurunkan Risiko Bencana dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah diintegrasikan dalam Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja BPBD Kota Palu Tahun 2022 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,50

Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan yang dimaksud dalam sasaran strategis ini adalah kemampuan masyarakat terdampak bencana dalam upaya penanggulangan bencana pada saat Pra Bencana, saat Tanggap darurat dan pasca bencana. Indeks risiko bencana dan Indeks Ketahanan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dimana Indeks Ketahanan Daerah naik maka Indeks risiko bencana menjadi turun. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekwensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
- Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- Pengembangan sistem pemulihan bencana

Untuk metode perhitungan nilai Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 dimana pada tahun lalu masih menggunakan metode indikator HFA (Hyogo Framework For Action) dengan menggunakan 10 langkah mendasar sehingga didapatkan angka absolut 263 point untuk indek ketangguhan Kota Palu tahun 2021, sedangkan dalam metode yang BPBD gunakan di tahun 2022 menggunakan perka BNPB nomor 3 Tahun 2012 dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah :

- Indeks $\leq 0,4$ adalah rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu

a. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian IKU Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4		
Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0.50	71 Indikator perka BNPB no 3 thn 2012	BPBD	Hasil Laporan IRBI (BNPB)

a.1 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skalanilai(%)	Kesimpulan evaluasi
1	85–100	SangatBerhasil
2	70–84,99	Berhasil
3	55–69,99	CukupBerhasil
4	<54,99	TidakBerhasil

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Interval (%)			
					<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,52				√

Sasaran :

“Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan”

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Kinerja *Indeks Risiko Bencana dengan sasaran Meningkatkan Infrastruktur Kebencanaan, indikator sasaran dan target* realisasi sebesar 151,43 dari target 146, Realisasi ini diukur dengan memperhatikan faktor Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Ketangguhan (Capacity) selanjutnya disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut sehingga, dengan demikian indeks risiko bencana ini merupakan penilaian seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. sedangkan evaluasi indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah dengan sasaran dan target realisasi sebesar 0,52 dari target 0,5 realisasi ini diukur dengan menggunakan 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 Indikator pencapaian, masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284) pertanyaan, dari pencapaian 71 indikator tersebut dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan diperoleh nilai indeks ketahanan daerah

Tabel 3.3
Capaian Strategis Meningkatkan Infrastruktur Kebencanaan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,50	0.52	95%

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	MOROWALI	177.20	177.20	177.20	177.20	173.80	173.80	174.82	174.82	TINGGI
2	MOROWALI UTARA	177.20	173.15	177.20	177.20	177.20	177.20	174.82	174.82	TINGGI
3	DONGGALA	189.20	189.20	172.27	157.13	157.13	157.13	166.75	166.75	TINGGI
4	BANGGAI KEPULAUAN	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
5	BANGGAI	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
6	BANGGAI LAUT	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
7	KOTA PALU	181.20	181.20	162.70	162.70	162.70	162.70	168.25	151.43	TINGGI
8	BUOL	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	TINGGI
9	TOLITOLI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	147.71	TINGGI
10	TOJO UNA-UNA	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	SEDANG
11	POSO	172.40	127.52	125.00	132.24	121.14	121.14	118.85	120.44	SEDANG
12	PARIGI MOUTONG	173.60	118.70	116.48	108.39	108.39	108.39	108.39	102.67	SEDANG
13	SIGI	72.00	50.22	49.79	52.16	48.13	48.13	51.00	49.27	SEDANG

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat
Nomor Surat : B-123.25/BNPB/D-I/SS.01.03/02/2023
Tanggal : 06 Februari 2023

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah

KABUPATEN / KOTA	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	PRIORITAS 4	PRIORITAS 5	PRIORITAS 6	PRIORITAS 7	IKD 2022
Banggai	0,32	0,20	0,25	0,30	0,33	0,29	0,40	0,31
Banggai Kepulauan	0,45	0,27	0,35	0,32	0,20	0,20	0,20	0,24
Buol	-	-	-	-	-	-	-	-
Donggala	0,29	0,20	0,20	0,24	0,20	0,20	0,20	0,21
Morowali	0,32	0,40	0,24	0,30	0,28	0,29	0,31	0,30
Morowali Utara	0,44	0,20	0,35	0,30	0,27	0,27	0,31	0,29
Palu	0,75	0,80	0,69	0,54	0,36	0,43	0,60	0,52
Parigi Moutong	0,85	0,67	0,52	0,70	0,51	0,55	0,86	0,63
Poso	0,62	0,50	0,55	0,40	0,32	0,48	0,44	0,45
Sigi	0,65	0,70	0,45	0,45	0,27	0,42	0,32	0,41
Tojo Una-Una	0,35	0,23	0,35	0,23	0,20	0,21	0,25	0,24
Toli-Toli	0,58	0,23	0,57	0,60	0,42	0,35	0,40	0,42

*Nilai Strip menunjukkan Kab/Kota tidak melakukan penilaian IKD pada 2022

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Ruditya Jati

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Risiko Bencana Kota Palu mengalami penurunan dari tahun lalu (2021) 168,25 menurun di tahun 2022 menjadi 151,43

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana *dengan sasaran* Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan, *indikator sasaran dan target* realisasi sebesar 151,43 dari target 146, untuk nilai indeks Risiko Bencana semakin menurun berarti lebih baik namun masih masuk kelas Tinggi Risiko bencana
2. Untuk evaluasi terhadap indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah *dengan sasaran* Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan, *indikator sasaran dan target* realisasi sebesar 0,52 dari target 0,50, dalam hal ini menggunakan metode pengukuran Indeks Ketahanan Daerah dari yang menggunakan metode penilaian yang dikeluarkan BNPB yaitu 71 Indikator Ketangguhan Kota (perka BNPB no 3 thn 2012) sehingga didapatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah 0,52 dari nilai tertinggi 1 masuk dalam kategori sedang dalam indeks ketahanan Daerah.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2022

Gambaran perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan nilai capaian target. Rata-rata nilai capaian target kinerja tahun 2021 sebesar 93,52% dan nilai capaian target kinerja tahun 2021 rata-rata sebesar 100%. Artinya bahwa nilai capaian target kinerja tahun 2021 dibanding dengan nilai capaian target kinerja tahun 2022 agak naik, rincian perbandingan nilai capaian target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target tahun 2021	% Capaian Target 2021	Realisasi Target tahun 2022	% Capaian Target 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	263	100%	0,58%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2021-2026

Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dibandingkan dengan Realisasi Capaian Renstra hingga tahun 2022 rata-rata telah teralisasi 95 %.

Tabel 3.5

Perbandingan Target Kinerja dalam RENSTRA 2021-2026 dengan realisasi Kinerja hingga tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target Renstra			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,56	0,6	0,62	0,63

d. Faktor Penyebab yang mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta solusinya.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sesuai target dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu dalam kurun waktu 2021 s/d 2026 tercapai. Semua ini dapat tercapai karena adanya dukungan dan kerjasama tim mulai dari tingkat jajaran pimpinan hingga staf BPBD.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capain target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran tahun 2022. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2022. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2022 dengan capain sebesar 95%, realisasi anggaran tahun 2022 untuk 2 program 9 kegiatan 28 sub kegiatan sebesar Rp.56.522.612.732,- atau (99,35%) dari target belanja langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp. 56.903.622.820,-

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2022

f. Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian target	Target Anggaran	Realisasi Anggaran 2022	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0.50	0,52	100%	52.525.423.850	52.324.390.344	99,62

Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Adapun program dan kegiatan tahun 2022, sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- ❖ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota

- ❖ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - ❖ Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC
 - ❖ Penyusunan Rencana Kontijensi
- C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ❖ Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mengelola anggaran sebesar Rp. 56.903.622.820,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 56.580.392.920,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 323.229.900,- Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bantuan sosial, sedangkan Belanja Modal tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal asset tetap lainnya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Palu terdiri dari 2 (dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 28 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2022 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 99,98% dan realisasi keuangan sebesar 99,35%, sedangkan penyerapan dana sebesar Rp. 56.522.612.732,- secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran
Sesuai dengan Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 4.378.198.970	Rp 4.198.222.388
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.263.000	Rp 2.263.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.993.625	Rp 1.993.625
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp 2.313.000	Rp 2.313.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.015.000	Rp 2.015.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.299.840.805	Rp 3.158.480.223
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Rp 3.754.825	Rp 3.696.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.234.400	Rp 2.234.400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 31.729.900	Rp 30.670.845
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 34.048.440	Rp 32.723.440
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 7.803.975	Rp 7.788.050
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp 4.620.000	Rp 3.350.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 202.943.000	Rp 201.266.172
	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa	Rp 132.317.400	Rp 116.944.300

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 308.511.600	Rp 303.495.354
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 218.400.000	Rp 212.913.056
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 108.960.000	Rp 102.675.923
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 9.000.000	Rp 7.950.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 5.450.000	Rp 5.450.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Rp 52.525.423.850	Rp 52.324.390.344
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Rp 46.859.200	Rp 46.859.200
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 10.875.000	Rp 10.875.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 42.000.000	Rp 41.735.312
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 24.425.000	Rp 24.425.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 51.428.636.600	Rp 51.272.994.192
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 32.750.000	Rp 26.750.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp 68.600.000	Rp 68.600.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 442.558.200	Rp 440.551.800
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 380.877.075	Rp 349.057.065
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp 47.842.775	Rp 42.542.775
	JUMLAH		Rp 56.903.622.820	Rp 56.522.612.732

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil evaluasi kinerja diperoleh gambaran bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2022 pada umumnya mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan.

Terdapat Beberapa Hambatan dan Keberhasilan permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja BPBD antara lain :

Hambatan :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peta-peta potensi bencana petunjuk penyelamatan dari bencana
2. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi lintas kelembagaan dalam penanggulangan bencana
3. Kurangnya ketersediaan peralatan dan teknologi kebencanaan

Keberhasilan :

1. Terbentuknya komunitas kebencanaan perkotaan
2. Adanya kerjasama Pemkot/BPBD dengan berbagai NGO
3. Adanya dukungan program yang diusulkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu adanya usaha bersama seluruh potensi masyarakat Kota palu yang diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja aparat penanggulangan bencana dan masyarakat dalam penanganan kejadian bencana
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia terkait penanganan kebencanaan;

3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar OPD dalam penanganan bencana
4. Meningkatkan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan sektoral
5. Memperjelas dan mengatur peran antar OPD khususnya dalam penanggulangan bencana
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana
7. Mengsosialisasikan Peta evakuasi dan jalur evakuasi kepada masyarakat
8. Menyediakan dan melengkapi peralatan tanggap darurat dan peralatan sistem peringatan dini
9. Meningkatkan alokasi dana kepada BPBD
10. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparat pemda dalam penanggulangan bencana
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan waspada terhadap ancaman bencana.